



Filsafat Politik Abu Hamid Al-Ghazali Dalam Kitab *At-Tibru Al-Masbuq Fi Nasihati Al-Muluk*

Mutiullah¹, Mohamad Nizar²

^{1,2}. Universitas Islam Neger Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 1mutiullah@uin-suka.ac.id ; 23205011004@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran filsafat politik Abu Hamid al-Ghazali yang terdapat dalam kitab *at-Tibru al-Masbūq fī nasīhati al-mulūk*. Pada harkatnya, kitab tersebut merupakan karangan yang khusus ditujukan oleh al-Ghazali kepada Sultan Muhammad bin Malik, seorang penguasa seljuk yang berkuasa kala itu. Kitab ini terdiri dari pembukaan, dua makalah, dan tujuh bab pembahasan yang mencakup pentingnya sebuah kekuasaan, hakikat khalifah, para menteri dan sekretaris, hingga semangat, dan tak lupa pembahasan perihal perempuan di dalamnya. Dengan metode kualitatif model deskriptif analitik, ditemukan bahwa selain sebuah nasehat untuk penguasa seljuk yang sedang berkuasa saat itu, kitab ini juga berisi curahan pemikiran-pemikiran politik al-Ghazali yang lahir dari latar belakang kehidupan dan cara beliau merespon keadaan politik saat itu. Di dalamnya, ada beberapa hal penting yang masih relevan digunakan untuk situasi politik di jaman sekarang.

Keywords: *Filsafat, Politik, Abu Hamid al-Ghazali, at-Tibru al-Masbuq fī nasihati al-muluk.*

A. PENDAHULUAN

Pada sekitar abad ke-9/10 M, kekuasaan Islam terpusat pada tiga titik wilayah, yakni Dinasti Umayyah II di Andalusia, Dinasti Fatimiyyah di Mesir, dan Dinasti Abbasiyah yang berpusat di Irak. Tahun-tahun itu, merupakan saat di mana tokoh besar pemikir Islam lahir, tumbuh, dan menebarkan pengaruhnya, yakni Imam Abu Hamid al-Ghazali. Beliau yang lahir pada abad tahun 1058 M, sebagian besar hidupnya dijalani di kekuasaan Abbasiyah, karena ia dilahirkan di wilayah Khurasan. Sebagai orang yang lahir dan besar di Sunni, tentu ia berbeda pandangan dengan mereka yang tinggal di wilayah Dinasti Fathimiyyah yang beraliran Islam Syi'ah. (Ilham 2022)

Produk pemikiran suatu tokoh pasti juga dilatarbelakangi oleh permasalahan yang ada atau kegelisahan yang ada pada dirinya, tak menutup kemungkinan ini juga terjadi pada al-Ghazali. Karena beliau adalah seorang pemikir besar, yang tak hanya ahli di bidang fiqh, tasawuf, dan filsafat, tapi juga dalam hal politik, maka beliau juga memberikan respon terhadap keadaan politik yang ada. Kala itu, keadaan politik sedang kacau, ditandai dengan perpolitikan Bani Abbas yang dikendalikan bangsa Seljuk, kebobrokan moral pejabat dari kelas bawah hingga kelas atas, korupsi di kalangan *umara'* juga kalangan ulama', intrik politik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, hingga berujung pada tewasnya salah satu pendukung al-Ghazali dari kalangan pemerintah, yakni Nizam al-Mulk. (Ulum 2022)

Merespon keadaan sedemikian itu, al-Ghazali tentu menuangkan buah-buah pemikiran filsafat politiknya dalam sebuah kitab yang pada hakikatnya merupakan sebuah nasihat yang dikirimkan kepada penguasa Seljuk dengan judul *at-Tibru al-Masbūq fī nasīhati al-mulūk*. (Febrianti 2018) Bahasa asli kitab itu adalah Bahasa Parsi yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab oleh beberapa kalangan. Salah satu versi penerjemahan lain adalah yang diberi judul *Natijah as-Suluk* (Buah Amal) yang diterjemahkan oleh 'Ala'ī ibn Muhammad Syarif asy-Syirazi Lusnan Bek. Kitab ini berisi mukadimah tentang nasihat al-Ghazali kepada sultan Seljuk, dua makalah, dan tujuh bab pembahasan. (Abu Hamid al-Ghazali 2001)

Secara singkat, dalam kitab *at-Tibru al-Masbūq fī nasīhati al-mulūk*, al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang khalifah/sultan adalah pelindung utama pelaksanaan hukum syariat. Maka dari itu, seorang pelindung utama beserta para pejabat pembantunya (*wazir*) harus memiliki etika politik yang benar dan sesuai syariat. Bila kenyataannya banyak kezaliman yang ada, maka bisa jadi ada masalah pada pelaku pelindung utama dan para *wazir*-nya. (Yakin 2018) Lebih jauh lagi, bila para pelindung utama yang berupa khalifah dan para *wazir*-nya bermasalah, maka menjadi tanda bahwa ulama yang ada pada pemerintahan tersebut juga bermasalah, yang kesemuanya ini tidak jauh dari kecintaan terhadap harta dan kedudukan. (Ulum 2022)

Pada masa sekarang, negara-negara menjalankan roda pemerintahannya tentunya tidak lepas dari pengaruh pemikiran para filsuf yang ada sebelumnya. Baik berkaca melalui Aristoteles, Plato, tokoh modern seperti Foucault, pun juga tokoh dari Islam seperti al-Farabi dan al-Ghazali. Tidak menutup kemungkinan, walaupun pemikirannya sudah berusia lama, namun masih relevan digunakan pada jaman sekarang, tentunya dengan penyesuaian terhadap konteks sekarang ini. (Ulum 2022)

Pemikiran politik Abu Hamid al-Ghazali tentunya bukan merupakan suatu hal yang baru dibahas di jaman sekarang. Terdapat banyak sekali karya seperti penerjemahan atas kitab-kitabnya, hingga penelitian-penelitian yang membahas pemikiran politik tersebut. Dalam tulisan ini, akan dijabarkan tiga jurnal yang membahas mengenai filsafat politik al-Ghazali sebagai tinjauan pustaka dan menentukan posisi dari penelitian yang dilakukan penulis. Jurnal pertama ialah jurnal yang ditulis oleh (Musayadah, Muhammad, and Susandi 2021) dengan judul "*Konsep Khalifatullah Terhadap Pengembangan Kepemimpinan Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab dan al-Ghazali*". Jurnal

ini bertujuan untuk menjelaskan konsep *Khalifatullah* menurut M. Quraish Shihab dan al-Ghazali, persamaan, dan perbedaan dari keduanya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Khalifatullah* dari keduanya berarti seorang penerus, pengganti, dan/atau pewaris. Bila konsep milik M. Quraish Shihab cenderung pada peran manusia sebagai pengemban amanah dari Tuhan, maka milik al-Ghazali cenderung pada kesultanan dan hal-hal yang berhubungan dengan politik.

Jurnal kedua adalah jurnal dengan judul “*Epistokrasi dalam Wacana Politik al-Ghazali dan Brennan*” yang ditulis pada tahun (Long et al. 2022). Epistokrasi yang dimaksud adalah keadaan politik di suatu negara yang dipimpin oleh orang-orang yang kemampuan intelektual (orang-orang cerdas). Jurnal ini memaparkan epistokrasi sebagai suatu sistem politik yang dipelopori oleh al-Ghazali dan Brennan yang merupakan dua tokoh yang memiliki pemikiran di bidang politik. Kesamaan pemikiran dari keduanya adalah bahwa pemimpin dipilih secara tertutup, dengan mengukhususkan kriterianya seperti kepintaran, sifat kompeten, etnik khusus, demografi khusus, dan lain sebagainya, sedangkan perbedaan keduanya terletak pada model pemikiran epistokrasi al-Ghazali yang condong ke arah teokrasi, yakni kepemimpinan yang berlandaskan asas-asas keagamaan (faktor tuhan).

Jurnal ketiga adalah jurnal dengan judul “*Figur Kiai di Madura Perspektif Teori Pemikiran Kekuasaan (Politik) al-Ghazali*” yang ditulis oleh (Abu Aman, Achmad As’ad Abd. Aziz, and Atiyatus Syarifah 2023). Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis figur para kiai dalam kacamata politik al-Ghazali. Data mengenai pemikiran politik berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena jurnal ini mengambil pemikiran politik yang ada pada seluruh karya al-Ghazali, bukan terkhusus pada kitab *at-Tibru al-Masbūq fī nasīhati al-mulūk*. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa figur kiai menjadi pemegang kendali utama persoalan masyarakat Madura yang mengalahkan figur pemerintah. Di samping itu, kiai juga menjadi figur yang meneruskan risalah nabi dan mendominasi dalam urusan agama.

Maka dari itu, dalam tulisan ini, akan dipaparkan pemikiran-pemikiran politik Abu Hamid al-Ghazali yang terdapat dalam kitab *at-Tibru al-Masbūq fī Nasīhati al-Mulūk*

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini bersifat *library research* (studi pustaka) dengan menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif yang dimaksud adalah metode deskriptif analitik, yakni metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya untuk kemudian diuraikan sekaigus dianalisis. (Suharsimi Arikunto 2010)

Langkah-langkah penelitian akan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka, baik data primer maupun sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data dari kitab *at-Tibru al-Masbūq fī Nasīhati al-Mulūk* milik Abu Hamid Al-Ghazālī, sedangkan data sekunder diambil melalui sumber selain buku tersebut, baik dari buku lain, jurnal, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Setelah data tersebut terkumpul, selanjutnya akan diuraikan dan dianalisis pemikiran-pemikiran politik Abu Hamid al-Ghazali yang terdapat dalam kitab *at-Tibru al-Masbūq fī Nasīhati al-Mulūk*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Abu Hamid al-Ghazali

Sebelum memaparkan mengenai pemikiran politik Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab *at-Tibru al-Masbūq fī Nasīhati al-Mulūk*, tentunya perlu diketahui mengenai latar belakang pemikir besar tersebut. Hal ini guna mengetahui latar belakang dan pengaruh seperti apa yang membentuk cara berpikir (epistemologi) beliau. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, adapun nama Abu Hamid adalah nama *kunyah* beliau yang berarti Bapak Hamid. Beliau lahir di kota kecil Thus yang termasuk wilayah Khurasan Iran pada Tahun 450 Hijriah bertepatan dengan tahun 1058 Masehi. (Al-Ghazālī 2005) Nama al-Ghazali diambilkan dari nama Ghuzalah yang merupakan nama sebuah kampung di Thus. (An-Nawawi al-Bantani n.d.) Waktu Al-Ghazali kecil, ia sudah mulai pada aktivitasnya belajar dan memperdalam segala macam keilmuan, selanjutnya setelah beranjak remaja ia pergi ke kota jurjan untuk belajar kepada Abu Nashar al-‘Isma’il dan akhirnya ke Naisabur untuk belajar kepada Abu al-Maali al-Juwaini yang digelar Imam al-Haramain. Kegigihan Al-Ghazali dalam memperdalam dan belajar tentang segala macam keilmuan, sehingga saat tinggal di Baghdad ia diminta untuk mengajar dan memimpin Universitas Nidzamiyah. Saat berada di lingkungan tersebutlah ia semakin populer di kalangan para intelek muslim kala itu, ia semakin dihormati dan disegani di kalangan dunia Islam berkat pemikiran dan pengabdianya pada kemajuan keberagamaan umat Islam.

Bila diikuti perjalanan intelektual Al-Ghazali, bisa dilihat transformasi pemikirannya yang di setiap fasenya berubah-ubah, di mana pada awal perjalanan intelektualnya kecondongan intelektualnya sangat menjunjung rasionalitas, namun di masa akhir-akhir kehidupannya Al-Ghazali banyak mencurahkan perhatiannya pada bidang Tasawuf dan dunia Sufi. Transformasi pemikiran tersebut tidak bisa dilepaskan dari kegundahan intelektualnya, sehingga pada ujung perjalanan intelektualnya seluruh perhatian intelektualnya mengarah pada Tasawuf dan Sufi. Di ujung perjalanan intelektualnya, lahirlah karya magnum opusnya yaitu *Ihya’ Ulumuddin, Minhaj Al-Abidin, Bidayah Al-Hidayah, Al-Adab Fi Ad-Dhin*, dan kitab *at-Tibru al-Masbūq fī Nasīhati al-Mulūk* yang dijadikan sebagai objek material dalam tulisan ini. Dari karya-karyanya yang inilah kemudian menjadikan beliau banyak dikenal dikalangan dunia Islam, bahkan pesantren di seluruh Indonesia menjadikan kajian-kajiannya bersumber dari karya-karya Al-Ghazali.

2. Pemikiran Politik al-Ghazali Dalam *at-Tibru al-Masbūq fī Nasīhati al-Mulūk*

Sebagaimana mana yang sudah dijelaskan sebelumnya, *at-Tibru al-Masbūq fī Nasīhati al-Mulūk* merupakan sebuah kitab yang berisikan mukaddimah, dua makalah, dan tujuh bab. Al-Ghazali banyak memberikan nasihat-nasihat pada bagian pendahuluan yang secara khusus ditujukan kepada Sultan Muhammad bin Malik. Dalam pendahuluan tersebut, al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam memimpin suatu pemerintah, seorang khalifah harus mengetahui pohon keimanan yang merupakan pokok penting dari semua perkara, Pohon itu harus dijaga keberadaannya, disirami, dirawat, dan terus ditumbuhkan hingga Islam bisa menaungi secara luas apapun yang ada di sekitar pohon tersebut. Pohon ini tidak akan bisa tumbuh kecuali dengan kokohnya 10 akar dan kuatnya cabang yang ada. 10 akar keimanan yang dimaksud ialah *al-I’tiqad* (keimanan), *fī at-tanzih* (penyucian Khalik), *fī qudrah* (kekuasaan Allah), *fī al-ilm* (pengetahuan Allah), *fī annahu Sami’* (pendengaran Allah), *wa annahu Bashir* (penglihatan Allah), *fī al-kalam* (kalam Allah), *fī al-af’al* (perbuatan Allah), *fī zikr al-akhirah* (peringatan akhirat), dan *fī zikr rasul* (mengingat kenabian). (Abu Hamid al-Ghazali 2001)

Setelah bagian pendahuluan, terdapat dua makalah yang oleh Ghazali ditujukan secara khusus untuk membahas mengenai keadilan dan kejujuran pada makalah pertama dan dua buah mata air (mata air dunia dan mata akhir kematian) pada makalah keduanya.

Pada makalah pertama, al-Ghazali menekankan bahwa seorang pemimpin harus memerhatikan mengenai kekuasaan dan kedudukannya, harus bergandengan dengan para ulama' atau yang dalam bahasanya disebut sebagai *al-ulama' ma'a al-umara'*, memiliki perhatian pada pejabat di bawahnya, memiliki pengendalian akan emosinya, selalu merefleksikan diri, peduli akan kebutuhan rakyat, memiliki sifat qanaah, lembut, selalu beriringan dengan hukum syariat Islam, dan tidak menggunakan kekuasaan dengan cara-cara sebaliknya (bertentangan dengan hukum syariat). (Siti Komariyah 2007) Pada makalah kedua, al-Ghazali menjelaskan mengenai dua buah mata air, yakni mata air dunia dan mata air kematian. Terhadap mata air dunia, al-Ghazali berpesan agar setiap orang, termasuk penguasa dan rakyatnya, tidak tersihir oleh godaan-godaan duniawi, seperti harta, tahta, dan syahwat manusia. Terhadap mata air kematian, al-Ghazali berpesan agar setiap orang menjadikan kematian sebagai cermin yang selalu digunakannya untuk merefleksikan diri, sehingga ia tahu bahwa dunia hanya sementara dan ia akan kembali ke asalnya setelah kematian (akhirat) untuk selamanya. (Abu Hamid al-Ghazali 2001)

Setelah pendahuluan dan dua makalah, al-Ghazali lebih lanjut mengisi kitab *at-Tibru al-Masbūq fi Nasīhati al-Mulūk* dengan tujuh bab yang terinci sebagai berikut (Abu Hamid al-Ghazali 2001):

1. Bab pertama mengenai keadilan, politik, dan perilaku penguasa. Dalam bab ini, dijelaskan bahwa Allah mengutus dua macam manusia, yakni nabi dan penguasa. Nabi bertugas menyampaikan risalah, sedangkan penguasa bertugas untuk mengawasi jalannya risalah kenabian dan melindungi dari adanya penganiayaan/kezaliman. Oleh karena itu, setiap penguasa haruslah berdasarkan hukum syariat yang ada dan diikuti oleh rakyatnya selama dalam ranah ketaatan terhadap hukum syariat.
2. Bab kedua mengenai politik para wazir. Pada bab ini, al-Ghazali menuturkan bahwa setiap penguasa memerlukan adanya wazir (menteri) guna membantu menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan pelindung terlaksananya hukum syariat dan kesejahteraan rakyatnya. Wazir ada dua macam, yakni wazir tafwidh dan wazir tanfidh. Wazir tafwidh adalah menteri yang diberikan urusan dengan kebebasan mutlak oleh penguasa, sedangkan tanfidh adalah menteri yang kebebasannya dibatasi oleh perintah tertentu dari penguasa. (Siti Komariyah 2007)
3. Bab ketiga berisi tentang sekretaris penguasa. Dalam bab ini, al-Ghazali menjelaskan bahwa jabatan sekretaris harus dipegang oleh orang yang berkompeten dalam hal analisis, hitung-hitungan, paham baca tulis, dan bisa merawat alat-alat fisik dalam urusan administrasi. Kalimat yang ditulis oleh sekretaris dalam urusan surat-menyurat haruslah singkat tapi padat maknanya.
4. Bab keempat berisi tentang ambisi para penguasa. Pada bab ini, al-Ghazali menuturkan bahwa seorang penguasa haruslah memiliki ambisi yang dalam hal ini berupa cita-cita yang luhur dan terpuji, atau dalam bahasa lain, memiliki visi-misi yang jelas, maju, dan memberikan dampak perubahan positif selama era kekuasaannya. Dengan ambisi yang luhur tersebut, maka penguasa akan tergerak pada hal-hal yang mulia. Catatan penting dalam hal ini adalah bahwa setiap penguasa adalah orang yang sudah beres dengan urusannya sendiri. Hal ini dikarenakan orang yang belum beres dengan masalah dalam dirinya, tidak akan bisa membereskan masalah (memberi solusi) orang lain.
5. Bab kelima berisi tentang kesadaran ahli hikmah. Hikmah yang dijelaskan al-Ghazali dalam hal ini adalah anugrah yang agung dari Allah kepada hamba pilihannya. Hikmah ini bisa berwujud kebijaksanaan dan nikmat yang diberikan Allah, khususnya kepada para penguasa. Untuk itu, hikmah harus digunakan dalam cara yang tepat.

6. Bab kelima berisi tentang kemuliaan akal dan orang-orang yang berakal. Seorang penguasa tentu harus memiliki akal yang sehat dan dapat digunakan dalam kebaikan, karena akal adalah salah satu ciptaan Allah yang paling mulia dan anugrah terbesar dalam diri manusia. Lebih lanjut lagi, keberadaan akal sehat akan mampu membuat manusia bergerak kepada kebaikan, karena akal mampu mengangkat yang jatuh, membenahi yang pecah, membuat kaya yang miskin, dan memuliakan yang hina.
7. Bab ketujuh berisi tentang ihwal para perempuan. Dalam bab ini, al-Ghazali menegaskan bahwa salah satu pondasi yang kuat dalam urusan politik adalah perempuan. Hal ini terbukti bahwa sekalipun dalam pemerintahan yang dipimpin oleh orang kafir seperti Fir'aun, tapi keberadaan perempuannya yang baik (Siti Asiyah) membuat pemerintahannya berjaya. Sebaliknya, pemerintahan akan buruk bila perempuannya buruk sekalipun roda pemerintahan tersebut dijalankan oleh seorang nabi.

D. KESIMPULAN

Dari penelitian terhadap at-Tibru al-Masbūq fī Nasīhati al-Mulūk karya Abu Hamid al-Ghazali yang dilakukan, diketahui bahwa kitab ini sarat akan nilai-nilai politik di dalamnya. Hal ini telah terpapar secara rinci mengenai pondasi agama yang berupa keimanan, lalu penjelasan mengenai penguasa, wazir (menteri), sekretaris, hingga pada urusan perempuan, dan penjelasan lain seputar hikmah dan akal. Pemikiran al-Ghazali yang tertera dalam kitab tersebut, tentu tidak terbebas dari konteks jamannya yang saat itu sedang terjadi degradasi dalam urusan politik. Tentunya, kitab tersebut tetap relevan digukan dalam jaman sekarang, mungkin tidak semuanya, namun bagian-bagian tertentu masih dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dan memberikan solusi dalam hal politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Aman, Achmad As'ad Abd. Aziz, and Atiyatus Syarifah. 2023. "Figur Kiai Di Madura Perspektif Teori Pemikiran Kekuasaan (Politik) Al-Ghazali." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 20(2). doi: 10.19105/nuansa.v20i2.8658.
- Abu Hamid al-Ghazali. 2001. *Etika Berkuasa: Nasehat-Nasehat Imam Al-Ghazali*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Al-Ghazālī. 2005. *Al-Munqidz Min al-Dhalal, Tahkik 'Abdul Halim Mahmud Alih Bahasa Abdul Munip*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- An-Nawawi al-Bantani. n.d. *Maraqī Al-Ubudiyah*.
- Febrianti, M. 2018. "Perpolitikan Indonesia Pasca Pilpres Dan Relevansi Teori Politik Al-Ghazali." *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan ...* 5(2).
- Ilham. 2022. "Imam Al-Ghazali, Biografi Sosial Dan Politik Kehidupan Si Pemikir Islam." *Muhammadiyah.or.Id*.

- Long, Ahmad Sunawari, Lukman Hakim, Hasse Jubba, and Wan Fariza Alyati Wan Zakaria. 2022. "Epistokrasi Dalam Wacana Politik Al-Ghazali Dan Brennan." *Islamiyyat* 44(IK). doi: 10.17576/islamiyyat-2022-44ik-3.
- Musayadah, Nikmatul, Devy Habibi Muhammad, and Ari Susandi. 2021. "Konsep Khalifatullah Terhadap Pengembangan Kepemimpinan Pendidikan Islam Persfektif M. Quraish Shihab Dan Al-Gazali." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 5(2). doi: 10.33487/edumaspul.v5i2.2134.
- Siti Komariyah. 2007. "Konsep Kekuasaan Dalam Islam (Kajian Atas Pemikiran Politik al-Ghazali)." Undergraduate Thesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ulum, Ahmad Manbaul. 2022. "Negara Adil Dan Makmur (Refleksi Filsafat Politik Al-Ghazali)." *POLITEA* 5(1). doi: 10.21043/politea.v5i1.14529.
- Yakin, Syamsul. 2018. "Pemikiran Politik Al-Ghazālī Seputar Konsesi Dan Kontroversi Pengangkatan Kepala Negara." *ILMU USHULUDDIN* 5(1). doi: 10.15408/iu.v5i1.12381.